

## Peran International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022

Indarto<sup>1</sup>, Ori Fahriansyah<sup>2</sup>, Syarif Redha Fachmi Al Qadrie<sup>3</sup>

TransBorders\*

### Abstract

*Using the theory of the role of international organizations, this research explains how the role of the International Organization for Migration (IOM) Thailand handles cases of Trafficking in Person (TIP) on the Thailand-Myanmar border in 2022. First, the role of the instrument, IOM Thailand helps the Thai government through the The Promise II program which helps Prospective migrant workers from Myanmar receive appropriate qualifications. Second, the role of the arena, IOM Thailand supports international forums discussing human trafficking crimes through the Bali Process forum, Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (Commit Process). Third, the role of independent actors, IOM Thailand implements the 4P strategy to handle the crime of human trafficking. The results of this research show that IOM Thailand has fulfilled the criteria for its role as an international organization in handling human trafficking cases.*

**Keywords:** *IOM Thailand; Trafficking in Persons (TIP); Thailand-Myanmar; The Promise II.*

### Abstrak

Menggunakan teori peran organisasi internasional, penelitian ini menjelaskan bagaimana peran *International Organization for Migration (IOM) Thailand* menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Thailand-Myanmar tahun 2022. Pertama, peran *instrument*, IOM Thailand membantu pemerintah Thailand melalui program *The Promise II* yang membantu para calon pekerja migran asal Myanmar mendapat kualifikasi layak. Kedua, peran *arena*, IOM Thailand mendukung forum internasional membahas kejahatan perdagangan manusia melalui forum *Bali Procces, Coordinated Mekong Ministerial Initiative Againts Trafficking (Commit Process)*. Ketiga, peran *independent actor*, IOM Thailand menerapkan strategi 4P menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian ini menunjukkan IOM Thailand sudah memenuhi kriteria peran sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci:** *IOM Thailand; Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Thailand-Myanmar; The Promise II.*

### Pendahuluan

Kawasan perbatasan suatu negara adalah bentuk perwujudan dari kedaulatan

wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan memiliki peranan strategis dalam penentuan batas wilayah independensi, penggunaan dan eksploitasi sumber daya

<sup>1</sup> Prodi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak

<sup>2</sup> Prodi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak

<sup>3</sup> Prodi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak

\* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS

Email: trans'borders@unpas.ac.id

alam, serta keutuhan dan keamanan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial terdapat di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan<sup>4</sup>.

Bentuk permasalahan baru yang timbul dalam lingkup keimigrasian seiring dengan peluang keterbukaan perbatasan atau *borderless* akibat globalisasi adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Landasan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Protokol Palermo tahun 2000. Pada pasal 3 (a) Protokol Palermo memberi definisi tindak pidana perdagangan orang sebagai:

*“...shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”*<sup>5</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Tindak Pidana

Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, setidaknya eksploitasi melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Selain prostitusi, korban juga diperdagangkan sebagai buruh dengan upah yang rendah, kebanyakan korban berasal dari daerah yang perbatasan<sup>6</sup>.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan penyumbang kasus TPPO tertinggi di dunia dengan menyumbang 60-70% kasus TPPO secara global dengan 90% korbannya adalah wanita dan anak-anak<sup>7</sup>.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang di dalamnya terdiri dari negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan ekonomi masyarakat kawasan telah mendorong orang dari negara berkembang ke negara maju untuk mendapat kehidupan lebih layak. Thailand merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan dan transit bagi para korban TPPO

<sup>4</sup> Bangun, Budi Hermawan. 2017. “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional.” *Tanjungpura Law Journal* 1 (1): 52-63.

<sup>5</sup> Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 2000. Palermo.

<sup>6</sup> Arby, Desy Lucia Ariyanti., Christy Damayanti., dan Dipokusumo. “Upaya UNIAP Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand.” *Jurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.

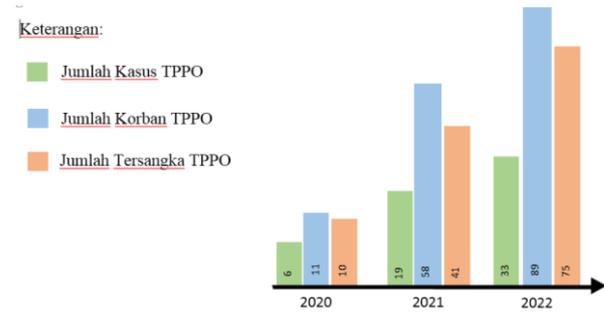
<sup>7</sup> Afriansyah, Renaldi., Valentine Febrianti., dan Irma Sari. 2022. “Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak).” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 2 (3): 223-230

karena wilayahnya yang strategis. Negara ini memiliki nilai geografis yang strategis karena menghubungkan negara kawasan *Greater Mekong Subregion (GMS)* yang terdiri dari Tiongkok, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Thailand dengan negara subregion di semenanjung Malaya seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand pada tahun 2022, di antara negara yang berbatasan dengan Thailand, Myanmar merupakan negara dengan penyumbang kasus TPPO terbanyak dengan 66 kasus, diikuti Kamboja dengan 33 kasus, selanjutnya Laos dengan 17 kasus, dan terakhir Malaysia dengan 4 kasus<sup>8</sup>. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik membahas mengenai kasus TPPO di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar.

Selanjutnya laporan dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand pada tahun 2022 kasus TPPO di perbatasan Thailand dan Myanmar cenderung naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut.

**Grafik 1.1. Kasus TPPO di Perbatasan Thailand dan Myanmar 2020-2022**



Sumber: *Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand (Olahan Penulis, 2023)*

Jumlah kasus TPPO tahun 2022 yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar sebanyak 33 kasus didominasi oleh kegiatan prostitusi dan eksploitasi seksual sebanyak 29 kasus, diikuti dengan eksploitasi tenaga kerja sebanyak 4 kasus. Hal ini telah mengancam keamanan manusia lintas batas serta telah merampas hak manusia sebagai makhluk yang memiliki hak untuk mendapat kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

Untuk memberantas masalah lintas batas perlu kerja sama antar negara untuk mencari kesejahteraan dan mencapai tujuan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama dan mengurangi pertikaian atau permasalahan yang terjadi<sup>9</sup>. Hal ini mendorong aktor internasional selain negara yang memiliki fokus dalam permasalahan TPPO yakni *International Organization for Migration* atau IOM sebagai organisasi internasional terkemuka dalam bidang migrasi internasional untuk mengambil tindakan menyelesaikan permasalahan ini sehingga tahun-tahun selanjutnya angka ini dapat

<sup>8</sup> Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand. "Database Thailand tentang penuntutan dan pendampingan korban perdagangan manusia." Diakses 6 Maret 2023. <https://www.e-aht.com/startup/gotoPowerBIBoard>

<sup>9</sup> Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

turun. Hal ini sesuai mandatnya yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dibentuk dalam upaya mendorong praktik migrasi yang tertib dan manusiawi, membantu membuat solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memfasilitasi pertolongan kemanusiaan bagi para migran yang membutuhkan, baik pengungsi, orang terlantar, dan korban perdagangan manusia.

### Metode Penelitian

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini yaitu menggambarkan bagaimana peran yang dilakukan IOM Thailand dalam menangani kasus TPPO di perbatasan Thailand-Myanmar pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, bersumber dari media internet, jurnal, berita, ataupun situs resmi pemerintah Thailand maupun organisasi IOM.

### Kerangka Teoritis

Peran organisasi internasional terbagi ke dalam tiga indikator. Pertama, peran organisasi internasional sebagai *instrument* yang mana suatu organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mendapat atau mencapai tujuan tertentu, umumnya terjadi pada organisasi internasional antar pemerintah yang mana anggota organisasi tersebut adalah negara yang memiliki kekuasaan untuk membatasi aktivitas dari organisasi internasional. Kedua, peran organisasi internasional sebagai *arena* berarti organisasi internasional memfasilitasi tempat untuk bertemu, berdiskusi,

berdebat, dan bekerja sama. *Arena* itu pada dasarnya netral yang digunakan untuk bermain antar anggota dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai suatu tujuan. Ketiga, peran organisasi internasional sebagai *independent actor* berarti organisasi internasional dapat bertindak di kancah internasional dalam membuat keputusannya sendiri tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan luar atau aktor internasional lainnya<sup>10</sup>.

### Pembahasan

#### Ancaman Keamanan Personal di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022.

Keamanan personal merupakan satu dari tujuh poin yang terdapat dalam cakupan keamanan manusia (*human security*) menurut laporan UNDP tahun 1994. Adapun poin keamanan personal menitikberatkan pada hal-hal yang menjadi ancaman berupa adanya ketakutan akan kekerasan secara psikis maupun kekerasan fisik yang menimpa seorang insani baik dari peperangan, terorisme, perang saudara, ancaman dari individu atau kelompok lain, aksi kriminal di jalan, penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, perburuan paksa, pelacuran serta narkoba<sup>11</sup>.

Perilaku-perilaku eksploitatif yang dilakukan terhadap para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang menjadi ancaman manusia yang dilakukan oleh seseorang

<sup>10</sup> Archer, Clive. 2001. *International Organization (Third Edition)*. New York: Routledge.

<sup>11</sup> Mumtazinur, dan Yenny Sri Wahyuni. 2021. "Keamanan Individu (*Personal Security*) dan Qanun

Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)". *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4(1): 76-89.

atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lain. Pelanggaran HAM dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik tergantung pada konteks HAM yang dilanggar<sup>12</sup>.

Para korban dieksploitasi melalui bermacam bentuk yang tidak insani dan tidak layak. Mereka dipekerjakan sebagai buruh tanpa diberikan gaji, diperlakukan dengan kasar, dieksploitasi secara seksual dan dipekerjakan dengan waktu serta beban kerja yang berlebihan<sup>13</sup>. Bentuk-bentuk ini merupakan ancaman terhadap keamanan personal dan melanggar martabat seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan.

Bentuk perdagangan manusia ini menempatkan orang yang menjadi korban pada situasi yang rawan terhadap bentuk kekerasan yang mengancam segi kesehatan jasmani maupun rohani<sup>14</sup>. Hal ini telah bertentangan dengan apa yang menjadi konsentrasi dari poin keamanan personal dari Laporan UNDP tahun 1994 dan tentunya bertentangan dengan prinsip universal seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand, mayoritas bentuk ancaman terhadap keamanan personal dalam wujud Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar pada tahun

2022 terbagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.

1. *Prostitution* (prostitusi)  
Ancaman keamanan personal yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar tahun 2022 dalam bentuk prostitusi sebanyak 33 kasus yang merupakan bentuk ancaman tertinggi yang terjadi.
2. *Sexual exploitation* (eksploitasi seksual)  
Ancaman keamanan personal yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar tahun 2022 dalam bentuk prostitusi sebanyak 29 kasus. Bentuk ancaman ini merupakan yang tertinggi kedua setelah bentuk prostitusi.
3. *Force labor* (kerja paksa)  
Ancaman keamanan personal yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar tahun 2022 dalam bentuk prostitusi sebanyak 4 kasus dan tertinggi setelah bentuk eksploitasi seksual<sup>15</sup>.

### **Peran *International Organization for Migration* (IOM) Thailand sebagai *Instrument***

Peran *instrument* suatu organisasi internasional merupakan peran yang digunakan oleh negara anggotanya untuk mendapat atau mencapai tujuan tertentu, umumnya terjadi pada organisasi internasional antar pemerintah yang mana

<sup>12</sup> Salsabila, Nisrina., dan Wachid Ridwan. 2023. "Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam langkah Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia". *Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global* 4(1): 40-49.

<sup>13</sup> Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

<sup>14</sup> Patriani, Ira., Ahirul Habib Fadilah., dan Obsatar Sinaga. 2023. *Human Trafficking di Perbatasan Indonesia*

(*Dalam Perspektif Peran Unit Counter Trafficking IOM di Entikong – Kalimantan Barat*). Yogyakarta: Deepublish.

<sup>15</sup> Ibid, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand. "Database Thailand tentang penuntutan dan pendampingan korban perdagangan manusia." Diakses 6 Maret 2023. <https://www.e-aht.com/startup/gotoPowerBIBoard>

anggota organisasi tersebut adalah negara yang memiliki kekuasaan untuk membatasi aktivitas dari organisasi internasional. Adanya peran ini sangat membantu bagi negara anggota dari organisasi internasional dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya<sup>16</sup>. Melalui aktivitas organisasi internasional ini tentunya akan sangat membantu negara anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu karena memiliki kesamaan kekhawatiran dan dapat didelegasikan pada organisasi internasional terkait.

Menurut kaum neo-liberalisme institusionalisme bahwa ketika interaksi kerja sama antara aktor internasional lebih menguntungkan dan menghasilkan *output* yang lebih baik daripada bentuk interaksi kompetisi atau konflik. Jika para aktor memperoleh kepuasan maka hasilnya mereka akan mudah berkomitmen dan menyelaraskan tindakan secara bersama-sama dalam membangun maupun memelihara sistem<sup>17</sup>. Melalui kerja sama antara IOM dan Kerajaan Thailand dalam menangani kasus TPPO khususnya di wilayah perbatasannya dengan Myanmar, membuat Thailand terbantu dengan keterbatasannya sehingga dapat fokus pada permasalahan yang lain.

Salah satu krisis yang terjadi di Thailand tahun 2022 adalah krisis tenaga kerja asing. Menurut Kamar Dagang Thailand membutuhkan setidaknya 500.000 tenaga kerja asing untuk memulihkan ekonomi nasional yang lambat

pasca pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Poj Aramwattanont, wakil ketua Kamar Dagang Kerajaan Thailand mengatakan permintaan pekerja tinggi pada sektor padat karya seperti pertanian dan pengolahan makanan untuk ekspor, konstruksi, dan pariwisata dan jasa<sup>18</sup>. Dapat dikatakan bahwa Thailand membutuhkan pekerja migran dengan keterampilan rendah untuk mengisi kekosongan pada sektor padat karya.

Kontribusi pekerjaan migran terhadap PDB Thailand sangat signifikan. Dengan asumsi bahwa kontribusi ekonomi pekerja migran secara luas terkait dengan jumlah pekerja, diperkirakan kontribusi ekonomi pekerja migran saat ini berkisar antara 4,3% hingga 6,6% dari PDB, dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 4,7%. Meskipun pekerja kelahiran asing cenderung memiliki posisi berketerampilan relatif rendah, kontribusi langsung mereka terhadap perekonomian Thailand, mereka juga cenderung dipekerjakan di bidang pertanian<sup>19</sup>. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pekerja migran yang memiliki keterampilan rendah juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi Kerajaan Thailand.

Pertama untuk mencegah perdagangan manusia di Kerajaan Thailand khususnya di perbatasan Thailand-Myanmar IOM memiliki program untuk membantu para pekerja migran yang akan bekerja di Thailand untuk mengembangkan potensi mereka, pemberdayaan diri, dan

---

<sup>16</sup> Putra, Muhammad Jaya Anggara., Obsatar Sinaga., dan Arry Abinus. 2018. "Peran Unit Counter Trafficking International Organisation for Migration (IOM) Dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB". *Dinamika Global* 3(2): 104-134.

<sup>17</sup> Ibid, Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>18</sup> Reuters. 2022. "Thailand needs 500,000 more migrant workers for recovery, the Chamber of Commerce says". *Reuters*, 12 Juli. Diakses 10 Juli 2023. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-needs-500000-more-migrant-workers-recovery-chamber-commerce-2022-07-12>

<sup>19</sup> OECD/ILO. 2017. *How Immigrants Contribute to Thailand's Economy*. Paris: OECD Publishing.

memaksimalkan kontribusi mereka untuk pembangunan sosial-ekonomi Thailand. Program ini dinamakan dengan *The Promise II*. Melalui program ini tentunya akan memiliki keuntungan dua sisi, baik dari para migran yang akhirnya terbedaya dengan kualifikasi profesional dan pemerintah Kerajaan Thailand yang mana ekonominya terdorong pasca pandemi.

Pada 9 Juli 2022, IOM dengan Thailand *Professional Qualification Institute* (TPQI) menyelenggarakan pelatihan teknis cara memasang batu bata (pekerjaan sektor konstruksi) kepada 16 orang pekerja migran asal Myanmar dibawah program *The Promise II*. Mereka diberikan pelatihan sehingga memiliki kompetensi dan keterampilan sebelum akhirnya terjun ke dunia kerja (konstruksi). Program ini sangat membantu Kerajaan Thailand karena terjadi di tengah-tengah kekurangan tenaga kerja di sektor konstruksi yang sedang berlangsung di Thailand<sup>20</sup>. Tentunya melalui pelatihan ini, para pekerja migran tidak rentan dengan bentuk penawaran kerja dari pihak yang tidak dikenal karena sudah dinaungi dua lembaga terpercaya seperti IOM dan TPQI.

Dapat dikatakan bahwa program *The Promise II* dari IOM selaras dengan program *the 13th National Economic and Social Development Plan* (NESDP) dari Kerajaan Thailand. Program *the 13th National Economic and Social Development Plan* (NESDP) merupakan program nasional Thailand memuat rencana ke-13 untuk merangsang

pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan ketika dunia dan Thailand masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyebabkan penyakit serta kematian tetapi juga kondisi ekonomi yang memburuk dan berdampak pada mata pencaharian semua kelompok penduduk. Selain itu, dalam memperjuangkan pembangunan nasional di tengah arus tren transformatif, penting untuk memperkuat kekuatan internal negara untuk memungkinkan terus bisa bertumbuh di tengah berbagai perubahan dan transisi dengan memperhatikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi negara secara berkelanjutan<sup>21</sup>. Dengan keselarasan visi kedua entitas ini yakni Thailand dan IOM akan memberi manfaat bagi kedua entitas sehingga dapat berjalan beriringan ke arah yang lebih baik.

### **Peran *International Organization for Migration* (IOM) Thailand sebagai *Arena***

Suatu organisasi internasional dulu hanya berfokus pada penyelesaian masalah keamanan dan memelihara perdamaian, namun sekarang telah memperluas cakupannya hingga mencangkau permasalahan kesejahteraan umat manusia<sup>22</sup>. Dalam peran *arena* atau forum dari suatu organisasi internasional menurut Clive Archer di dalamnya terdapat interaksi-interaksi yang mana organisasi menyediakan fasilitas atau wadah untuk bertemu anggotanya untuk membahas atau bekerja sama<sup>23</sup>. Oleh karena itu suatu

<sup>20</sup> IOM Thailand. 2022. "IOM Country Strategy 2022-2026." Diakses 27 Juli 2023. <https://m.facebook.com/IOMThailand/posts/3179932732316997/>

<sup>21</sup> Office of the National Economic and Social Development Council Office of the Prime Minister Bangkok, Thailand. "THE THIRTEENTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN

(2023-2027)".

[https://www.nesdc.go.th/nesdb\\_en/download/article/article\\_20230615134558.pdf](https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/download/article/article_20230615134558.pdf)

<sup>22</sup> Ibid, Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>23</sup> Ibid, Putra, Muhammad Jaya Anggara., Obsatar Sinaga., dan Arry Abinus. 2018. "Peran Unit Counter Trafficing International Organisation for Migration (IOM)

organisasi internasional dituntut dapat melaksanakan peran ini dalam membuat suatu forum pertemuan berkala agar negara anggotanya dapat bertemu dan membahas kekhawatiran bersama.

Pertemuan semacam ini dibutuhkan, setidaknya terdapat dua urgensi yang diperhatikan. Pertama, pertemuan atau forum supaya adanya komunikasi terjalin dengan baik antar sesama anggotanya. Kedua, pertemuan yang terjadwal dan berulang-ulang dibutuhkan dalam memastikan adanya koordinasi yang baik dari kantor pusat IOM, kantor regional, hingga kantor perwakilan di setiap negara anggota IOM, dan tidak ada yang menyimpang dari fokus visi dan misi serta strategi yang telah ditentukan oleh organisasi<sup>24</sup>.

Sebagai contoh adalah diadakannya pertemuan berkala yang dilaksanakan di Bali yang dinamakan dengan *Bali Process*. Dalam buku Ira Patriani dkk (2023), berdasarkan hasil wawancara dengan Vinsen Shianto bahwa pertemuan ini diprakarsai oleh IOM yang mana diadakan tahunan yakni 3 tahun sekali. Dalam pertemuan ini membahas khusus tentang kejahatan berskala internasional yang sering terjadi seperti *human trafficking*, *human smuggling*, pencucian uang, dan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Outputnya berbentuk suatu rekomendasi tertulis seperti buku mengenai kebijakan dan pencucian uang serta *human trafficking*. Khusus untuk membahas mengenai perdagangan manusia dibuat forum bernama *Working Group Trafficking*

*In Persons*<sup>25</sup>. Konferensi Tingkat Menteri *Bali Process* ke-8 diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2023, pada Konferensi Tingkat Menteri Bali Process ke-8 para Menteri menegaskan kembali perlunya pendekatan yang berfokus pada masa depan terhadap perubahan pola penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional.

Selanjutnya IOM juga membuat forum *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (Commit Process)*. Forum ini merupakan dialog kebijakan tingkat tinggi negara-negara di *Greater-Mekong Sub-region (GMS)* yang mana anggotanya terdiri dari Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara ini menyadari bahwa mereka tidak dapat memerangi perdagangan manusia secara efektif sendirian. Untuk itu perlu menggabungkan upaya pencegahan perdagangan, perlindungan korban dan repatriasi dan reintegrasi mereka, dan penuntutan pelaku kejahatan yang bertanggung jawab<sup>26</sup>. Melalui forum ini para anggota dapat bertukar pemahaman serta pendekatan dalam menangani kasus TPPO khususnya di sub-region Mekong yang memiliki karakteristik yang sama. Fokus forum ini adalah bidang diskusi tertentu meliputi memerangi perdagangan manusia, memerangi penyelundupan migran, memerangi kerja paksa, dan mekanisme rujukan nasional bagi orang-orang yang diperdagangkan.

Pada 15-16 Desember 2022 Thailand menjadi *host* atau tuan rumah dari

Dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB". *Dinamika Global* 3(2): 104-134.

<sup>24</sup> Patriani, Ira., Ahirul Habib Fadilah., dan Obsatar Sinaga. 2023. *Human Trafficking di Perbatasan Indonesia (Dalam Perspektif Peran Unit Counter Trafficking IOM*

*di Entikong – Kalimantan Barat*). Yogyakarta: Deepublish.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> IOM. 2023. "Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (Commit Process)." Diakses 12 Juli 2023. <https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process>

penyelenggaraan forum ini di bawah Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, dipimpin oleh Bapak Anukul Peedkaew. Pesertanya mencakup lebih dari 200 perwakilan dari enam negara anggota, yaitu Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand<sup>27</sup>.

Selanjutnya terdapat forum khusus yang diinisiasi oleh IOM yaitu *Border Committee on Anti-Trafficking in Persons* (BCATIP) namun sejak pandemi pertemuan *Border Committee on Anti-Trafficking in Persons* (BCATIP) telah ditangguhkan. Pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral khusus kedua negara yaitu Thailand dan Myanmar untuk berbagi informasi dan memperkuat kerja sama dalam menangani TPPO, pertemuan biasa diselenggarakan di provinsi Ranong (Thailand) dan mengadakan pertemuan dengan Negara Bagian tetangga di Myanmar yang dilakukan dua kali setahun sejak 2011. Penangguhan koordinasi dengan Myanmar dikarenakan perubahan politik dan pandemi yang terjadi. Prosedur repatriasi dan deportasi ke Myanmar telah ditangguhkan selama beberapa tahun sejak 2019. Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, BCATIP belum terselenggara kembali sehingga sulit untuk berkoordinasi dengan pihak Myanmar secara berkelanjutan<sup>28</sup>. Perlu rasanya IOM menginisiasi kembali forum ini mengingat forum ini terkonsentrasi khusus terhadap permasalahan TPPO di perbatasan Thailand

dan Myanmar mengingat kasus cenderung naik dari 2020 hingga 2022.

### **Peran *International Organization for Migration (IOM) Thailand* sebagai *Independent Actor***

Peran *independent actor* organisasi internasional berarti organisasi internasional itu melakukan aktivitas sesuai dengan visi dan misinya tanpa ada intervensi dari aktor internasional lainnya. Organisasi internasional merupakan entitas *autonomous* dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai aktor internasional dan tidak lagi hanya sebagai pelaksanaan kepentingan anggotanya<sup>29</sup>. Hal ini dapat diartikan bahwa IOM sebagai organisasi internasional memiliki pandangan subjektif sesuai visi dan misinya dalam menjalankan kegiatannya. Dalam lingkup global, IOM memandang dirinya sebagai organisasi yang memiliki mandat untuk ikut serta dalam menanggapi bermacam bentuk kejahatan khususnya terkait kejahatan yang menyangkut proses migrasi internasional seperti perdagangan manusia.

Peran IOM sebagai *independent actor* dapat dilihat melalui strategi yang disusun oleh IOM untuk menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, IOM Thailand memiliki kerangka kerja atau strategi 4P IOM. Oleh karena itu pada peran ini penulis akan membagi peran *independent actor* IOM Thailand menjadi 4 bagian sesuai strateginya dalam memberantas

<sup>27</sup> Bangkok Post. 2022. "Thailand hosts COMMIT meeting against trafficking in six Mekong countries". *Bangkok Post*, 21 Desember 2022. Diakses 12 Juli 2023 <https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2465820/thailand-hosts-commit-meeting-against-trafficking-in-six-mekong-countries>.

<sup>28</sup> DATIP & JICA. 2022. *Kingdom of Thailand Project For Regional Strengthening Network for Combating*

*Trafficking In Persons (TIP) in Mekong Region Short-Term Expert (Counter-Trafficking In Persons) Project Activities Completion Reports*.

<sup>29</sup> Ibid, Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Pencegahan (*prevention*)

Dalam mencegah terjadinya kasus kejahatan perdagangan manusia di perbatasan Thailand-Myanmar, IOM Thailand sadar perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi para calon pekerja migran yang akan bekerja di Thailand, sehingga mereka tidak rentan dengan bentuk-bentuk penipuan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam pekerjaan yang tidak layak. Untuk itu IOM Thailand memiliki program *The Promise II* yang mana telah membantu para pekerja dari Myanmar yang akan bekerja di Thailand dengan pelatihan bahasa, keterampilan teknis, pemberian konsultasi mengenai pekerjaan yang layak, pengembangan kualifikasi profesional untuk memaksimalkan potensi mereka sehingga sadar hukum, dan SOP pekerjaan. Kualifikasi ini tentunya akan membuat calon pekerja migran semakin terberdaya dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai dunia pekerjaan yang akan mereka lakukan sehingga mereka tidak rentan dengan penipuan yang akhirnya mengarahkan mereka pada perdagangan manusia. Kegiatan pemberantasan perdagangan manusia IOM di Thailand didukung secara finansial oleh Uni Eropa, Pemerintah Jepang, Dana Pembangunan IOM dan Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri AS.

Selanjutnya tidak hanya pada pemberian pengembangan sumber

daya manusia pada para calon pekerja migran, IOM Thailand juga melakukan diplomasi publik dengan mengedukasi masyarakat yang rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Pada 13 Desember 2022, IOM Thailand mengadakan acara nonton bersama film *Buoyancy the Film* di Mae Sot dan diikuti oleh 150 partisipan dari berbagai golongan. Film tersebut merupakan film yang menceritakan seorang migran yaitu anak 14 tahun yang menjadi korban perdagangan manusia. Pada akhir sesi para penonton berdiskusi mengenai migrasi yang aman, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan layanan perlindungan<sup>30</sup>. Upaya ini tentunya sebagai bentuk penyadaran kepada orang-orang di Mae Sot bahwa adanya ancaman nyata dari perdagangan manusia.

2. Perlindungan (*protection*)

IOM Thailand mempromosikan kesehatan mental para migran yang rentan terhadap perdagangan manusia. Pada tahun 2022 IOM Thailand telah membantu 366 migran yang rentan dengan bimbingan ahli (psikolog). Selanjutnya IOM Thailand memberikan pelatihan kepada 246 pejabat pemerintahan Thailand mengenai kesehatan mental untuk membantu kebutuhan para migran yang rentan dan korban TPPO.

Pada 8 Oktober 2022, IOM Thailand telah mengadakan pertemuan selama dua hari dengan pejabat dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand

<sup>30</sup> IOM Thailand. 2022. Diakses 17 Juli 2023. [https://www.instagram.com/p/CmJVghwPDx9/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/CmJVghwPDx9/?img_index=1)

dan 60 pejabat pemerintahan di Provinsi Chantaburi dan Provinsi Tak. Dalam pertemuan ini mereka membahas mengenai pelatihan yang mencakup identifikasi korban perdagangan orang, memberikan bantuan rujukan, dan perlindungan migran yang rentan.

### 3. Penindakan (*prosecution*)

Pada periode Juni hingga September 2022, IOM Thailand mengadakan pertemuan dengan *Departement of Special Investigation* Thailand. IOM Thailand melatih 117 penegak hukum untuk mendidentifikasi dan membantu korban perdagangan manusia. Pertemuan ini diadakan di Bangkok, Pataya, dan Ranong<sup>31</sup>. Dengan semakin banyaknya jaring yang ditebarkan IOM Thailand melalui pelatihan dan pemahaman kepada pejabat Thailand tentunya akan semakin dapat menjaring orang-orang yang terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan begitu akan mudah memberikan upaya perlindungan sebelum mereka masuk ke tempat pekerjaan (tempat di mana mereka akan dieksploitasi). Peran IOM di sini adalah sebagai pemberi pelatihan bagi para penegak hukum dalam mengidentifikasi korban TPPO. IOM tidak memiliki kewenangan dalam menindak para pelaku kejahatan ini. Masalah ini kembali diserahkan kepada penegak hukum di Kerajaan Thailand.

### 4. Kemitraan (*partnership*)

Pada 7 Juli 2022 IOM Thailand bermitra dengan Dinas Provinsi Pembangunan Sosial Manusia dan Keamanan Manusia (SDHS) Thailand, melakukan pelatihan tentang pengenalan perdagangan manusia untuk penerjemah di provinsi Tak. Selama dua hari ke depan, IOM dan Dinas Provinsi Pembangunan Sosial Manusia dan Keamanan Manusia Provinsi Tak akan melatih 20 juru bahasa dari lima distrik perbatasan di provinsi Tak untuk memahami perdagangan manusia, termasuk konteks dan undang-undang setempat, prinsip dan etika interpretasi, pengalaman korban dan dampak perdagangan manusia terhadap individu, serta keterampilan yang relevan dalam mewawancarai korban perdagangan orang. Penerjemah mewakili lembaga pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat, dan mendukung tim multidisiplin Thailand dalam melakukan wawancara dengan calon dan korban perdagangan orang yang dikonfirmasi.

Pelatihan ini berfokus pada pemahaman indikator perdagangan manusia dan kerja paksa, serta peran penerjemah selama proses penyaringan korban. Seperti yang ditekankan oleh Khun Jiraporn Khumput, Kepala Dinas Pembangunan Sosial Manusia dan Keamanan Manusia (SHDS) Provinsi Tak, penerjemah memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah provinsi dalam memberikan layanan kepada korban perdagangan manusia dan menjembatani ketegangan

---

<sup>31</sup> IOM Thailand. 2022. Diakses 17 Juli 2023. [https://www.instagram.com/p/CjXsk9yvv3M/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/CjXsk9yvv3M/?img_index=1)

komunikasi antara korban dan petugas<sup>32</sup>. Ketika korban merasa dilayani tentunya akan menimbulkan keterbukaan sehingga korban mau bertindak kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan petugas terkait untuk menangani kasus lebih jauh.

### Kesimpulan

Kasus TPPO di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar yang kian naik dari tahun 2020 hingga 2022 mendorong salah satu organisasi internasional yang memiliki perhatian mengenai kejahatan perdagangan manusia yaitu IOM Thailand untuk bertindak menangani permasalahan ini. Adapun hasil penelitian menunjukkan peran IOM Thailand sebagai berikut.

1. Peran IOM Thailand sebagai *instrument* yakni melalui program PROMISE II yang mana selaras dengan program *the 13th National Economic and Social Development Plan* (NESDP). Melalui implementasi program IOM tersebut membantu Kerajaan Thailand untuk mendapat tenaga kerja asing yang terampil dari negara tetangga khususnya Myanmar ditengah krisis 500.000 tenaga kerja asing di Kerajaan Thailand. Melalui program ini juga akan membantu para pekerja migran dari kerentanan terhadap penipuan atau pemberdayaan yang akhirnya menjeremuskan mereka pada perdagangan manusia.
2. Peran IOM Thailand sebagai *arena* yakni IOM mendukung pertemuan seperti *Bali Process* dan

*Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (Commit Process)*. Dua forum ini merupakan forum yang membahas mengenai kejahatan lintas batas khususnya juga membahas perdagangan manusia.

3. Peran IOM Thailand sebagai *independent actor* yakni melalui diimplementasikannya pendekatan penyelesaian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kerangka kerja 4P yang mana sesuai dengan mandat IOM untuk menciptakan migrasi yang manusiawi dan inklusif.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Archer, Clive. *International Organization* (Third Edition). New York: Routledge. (2001).
- OECD/ILO. *How Immigrants Contribute to Thailand's Economy*. Paris: OECD Publishing. (2017).
- Patriani, Ira., Ahirul Habib Fadilah., dan Obsatar Sinaga. *Human Trafficking di Perbatasan Indonesia (Dalam Perspektif Peran Unit Counter Trafficking IOM di Entikong – Kalimantan Barat)*. Yogyakarta: Deepublish. (2023).
- Rudy, Teuku May. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama. (2009).
- Winarno, Budi. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center

<sup>32</sup> IOM Thailand. 2022. Diakses 18 Juli 2023. <https://m.facebook.com/IOMThailand/posts/3176948072615463/>

of Academic Publishing Service (CAPS). (2014).

### Dokumen Resmi:

DATIP & JICA. "Kingdom of Thailand Project For Regional Strengthening Network for Combating Trafficking In Persons (TIP) in Mekong Region Short-Term Expert (Counter-Trafficking In Persons) Project Activities Completion Reports." 2022.

Office of the National Economic and Social Development Council Office of the Prime Minister Bangkok, Thailand. "THE THIRTEENTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2023-2027)".

[https://www.nesdc.go.th/nesdb\\_en/download/article/article\\_20230615134558.pdf](https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/download/article/article_20230615134558.pdf)

United Nations. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime," 2000. Palermo.

### Jurnal:

Afriansyah, Renaldi., Valentine Febrianti., dan Irma Sari. 2022. "Upaya Asean dalam Menangani *Human Trafficking* di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 2 (3): 223-230.

Arby, Desy Lucia Ariyanti., Christy Damayanti., dan Dipokusumo. tt. "Upaya Uniap Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand."

*Jurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.*

Bangun, Budi Hermawan. 2017. "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 1 (1): 52-63.

Mumtazinur, dan Yenny Sri Wahyuni. 2021. "Keamanan Individu (*Personal Security*) dan Qanun Hukum Keluarga: *Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)*". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4(1): 76-89.

Putra, Muhammad Jaya Anggara., Obsatar Sinaga., dan Arry Abinus. 2018. "Peran Unit Counter Trafficking International Organisation for Migration (IOM) Dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB". *Dinamika Global* 3(2): 104-134.

Salsabila, Nisrina., dan Wachid Ridwan. 2023. "Peran International Organization for Migration (IOM) dalam langkah Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia". *Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global* 4(1): 40-49.

### Online:

Bangkok Post. "Thailand hosts COMMIT meeting against trafficking in six Mekong countries". *Bangkok Post*, 2022.

<https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2465820/thailand-hosts-commit-meeting-against-trafficking-in-six-mekong-countries>.

- Facebook IOM Thailand, 2022.  
<https://m.facebook.com/IOMThailand/posts/3176948072615463/>
- IOM Thailand. "IOM Country Strategy 2022-2026." 2022.  
<https://m.facebook.com/IOMThailand/posts/3179932732316997/>
- IOM. 2023. "Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (Commit Process)." 2023.  
<https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process>
- Instagram IOM Thailand, 2022.  
[https://www.instagram.com/p/CmJVghwPDx9/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/CmJVghwPDx9/?img_index=1)
- Instagram IOM Thailand, 2022.  
[https://www.instagram.com/p/CjXsk9yv3M/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/CjXsk9yv3M/?img_index=1)
- Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kerajaan Thailand. "Database Thailand tentang penuntutan dan pendampingan korban perdagangan manusia." <https://www.e-aht.com/startup/gotoPowerBIBoard>
- Reuters. "Thailand needs 500,000 more migrant workers for recovery, the Chamber of Commerce says". *Reuters*, 2022.  
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-needs-500000-more-migrant-workers-recovery-chamber-commerce-2022-07-12>